



JUMAT, 24 AGUSTUS 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

KPK Tegur Pemkab Kepahiang

KEPAHIANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia bersih dari segala tindak pidana korupsi, dan menjalankan birokrasi pemerintahan yang bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara KPK untuk memonitor setiap kegiatan melalui aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepahiang melaporkan setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Namun, progress laporan yang dituangkan dalam

progress Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (RAPPKT) tersebut belum berjalan mulus sehingga teguran pun dilayangkan KPK ke Pemkab Kepahiang.

Teguran tersebut karena OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang sama sekali belum ada yang melaporkan RAPPKT melalui aplikasi tersebut. Kabupaten lain di Bengkulu yang juga ditegur yakni Bengkulu Tengah (Benteng). "Ini program nasional dan saya berharap agar seluruh OPD dapat segera menyampaikannya, ini adalah komitmen kita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kepahiang," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang,

Zamzami Zubir, SE, MM saat memimpin rapat koordinasi yang dihadiri OPD-OPD se Kabupaten Kepahiang bertempat di Aula Setda, Kamis (23/8) siang.

Menurut Inspektur Ipda Kepahiang, Harun, SE, Ak, M.Si, penyampaian RAPPKT oleh setiap OPD wajib disampaikan agar KPK dapat melihat langkah yang dilakukan OPD dalam melaksanakan RAPPKT.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri para asisten, kepala OPD, kabag, kabid, dan camat se Kabupaten Kepahiang. Pada kesempatan itu, Sekda juga menegaskan agar apa laporan RAPPKT ini benar-benar disampaikan OPD secara serius. (zie)